





LAPORAN KINERJA BIRO KEUANGAN

TAHUN 2022

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2022

 [birokeuangandpr](#)

 biro_keuangan@dpr.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Keuangan. Secara umum, pada tahun 2022, Biro Keuangan telah berhasil mencapai sebagian besar target indikator kinerja dengan sangat baik dengan penggunaan anggaran yang cukup efisien. Semua itu dapat terlaksana berkat kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Biro Keuangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Keuangan atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi, sehingga kerja kita bersama membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja tahun 2022 ini dapat bermanfaat dalam pengukuran kinerja Biro Keuangan dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Keuangan serta Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 5 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO KEUANGAN

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Rahmad Budiaji, S.IP, MSi

Penanggungjawab

Agus Sutari, S.Sos.

Timbang Supriyanto, S.Sos.

Dwi Widayanti, S.IP.

Ketua

Harry Budhi Hartanto, S.E., M.E.

Wakil Ketua

Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak.

Sekretaris

Martiasih Nursanti, S.E., M.E.

Anggota

Vega Lavlinesia, S.E. M.Ak

Dra. Rofi'ah

Edy Sumitra, S.E.

Dicky Firmansyah, S.Sos.

Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.

Weda Herdyotanto Pramu Wardhana, S.E.

Dwinanto, S.E.

Tariyono, S.A.P.

Muhammad Raqiban Siddik, S.STP

Mukharor

Muhammad Arif Sardi, S.Pi

Untoro Wibowo Putro, S.A.P., M.AP

Diah Ayu Nuryanti, S.E.

T. Denny Rifky, S.E.

Irfan Alvianto, S.E.

Imam Surahman

Sulistiyono Dwi Utomo

Tim Layout

Fithriyyah Nur Afifah S, S.M

Bening Laudita Irbah, A.Md.Ak.
Chelsea Kezia Melinda Dapu, A.Md.Kb.N.
Mery Dwi Restiana A.Md.Ak.



DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

i

TIM PENYUSUN

ii

DAFTAR TABEL

v

| | |
|------|----|
| 1. | 5 |
| 1.1. | 5 |
| 1.2. | 8 |
| 1.3. | 8 |
| 1.4. | 13 |
| 2. | 15 |
| 2.1. | 15 |
| 2.2. | 18 |
| 2.3. | 18 |
| 3. | 20 |
| 3.1. | 20 |
| 3.2. | 21 |
| 3.3. | 43 |
| 4. | 44 |
| 4.1. | 44 |
| 4.2. | 45 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024 | 23 |
| Tabel 2. Rencana Kerja Biro Keuangan Tahun 2022 | 25 |
| Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 | 26 |
| Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2022 | 27 |
| Tabel 5. Indikator IKPA | 29 |
| Tabel 6. Indeks Pengelolaan Keuangan | 31 |
| Tabel 7. Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan | 32 |
| Tabel 8. Realisasi dan Standar Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan | 33 |
| Tabel 9. Parameter Indeks Pengelolaan Aset | 35 |
| Tabel 10. Perbandingan Kondisi SDM, Sumber Dana dan Sarpras | 37 |
| Tabel 11. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI | 40 |
| Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Satker Dewan | 41 |
| Tabel 13. Ketidaksesuaian Pencatatan Transaksi | 42 |
| Tabel 14. Indeks Kesesuaian Pencatatan Transaksi | 44 |
| Tabel 15. Penggunaan Anggaran Pelaporan | 45 |
| Tabel 16. Realisasi Anggaran Biro Keuangan | 48 |
| Tabel 17. Target dan Realisasi Anggaran | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--|-------------------------------------|----|
| Gambar 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja TA 2022 | Error! Bookmark not defined. | 11 |
| Gambar 2. Realisasi Anggaran per Satker TA 2022 | | 11 |
| Gambar 3. Komposisi Pegawai Biro Keuangan | | 14 |
| Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | | 14 |
| Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelas Jabatan | | 15 |
| Gambar 6. Komposisi PPNASN Biro Keuangan | | 16 |
| Gambar 7. Struktur Organisasi Biro Keuangan | Error! Bookmark not defined. | 18 |
| Gambar 8. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Keuangan | | 18 |
| Gambar 9. Struktur Organisasi Bagian Administrasi BMN | | 19 |
| Gambar 10. Struktur Organisasi Bagian Perjalanan | | 20 |
| Gambar 11. Visi dan Misi Setjen DPR RI | | 23 |
| Gambar 12. Indeks Pengelolaan Keuangan | | 28 |
| Gambar 13. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pengelolaan Keuangan antar Tahun | | 28 |
| Gambar 14. Indeks Pengelolaan Aset | | 33 |
| Gambar 15. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pengelolaan Aset antar Tahun | Error! Bookmark not defined. | 37 |
| Gambar 16. Indeks Kepuasan Layanan | | 37 |
| Gambar 17. Laporan Hasil Survey Bagian Administrasi Keuangan | | 38 |
| Gambar 18. Laporan Hasil Survey Bagian Perjalanan | | 38 |
| Gambar 19. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kepuasan Anggota DPR RI antar Tahun | | 39 |
| Gambar 20. Indeks Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah | | 42 |
| Gambar 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kesesuaian Pencatatan Transaksi antar Tahun | | 43 |
| Gambar 22. Persentase Tata Kelola BMN | | 45 |
| Gambar 23. Persentase Realisasi Anggaran | | 45 |
| Gambar 24. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan antar Tahun | | 46 |
| Gambar 25. Penghargaan Atas Realisasi SV Terbesar Satker Kelolaan KPPN Jakarta VII | | 52 |
| Gambar 26. Juara Ketiga Anugerah Reksa Banda | | 52 |
| Gambar 27. Bimbingan Teknis Pengisian E Kinerja dan Evaluasi Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022 | | 53 |
| Gambar 28. Workshop dan Penandatanganan Pakta Integritas Optimalisasi IKPA DPR RI | | 53 |

Gambar 29. Proses pengukuran tanah kompleks perumahan DPR RI di Meruya, Kelapa Dua, Kemanggisan, dan Kebon Jeruk atas Fasum/fasos yang dimanfaatkan oleh Pegawai Setjen DPR RI

54

Gambar 30. Workshop Penguatan Verifikasi Tagihan Perjalanan Dinas **Error! Bookmark not defined.**



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja (LKj) Biro Keuangan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022. LKj ini diharapkan sebagai acuan untuk perbaikan kinerja tahun-tahun selanjutnya, serta sebagai bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021, Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dalam menjalankannya fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon III yaitu Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Administrasi Barang Milik Negara dan Bagian Perjalanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2022, Biro Keuangan menghadapi tantangan strategis yang berasal dari dinamika internal dan eksternal, di antaranya:

1. Pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Keuangan (IKPA) bergantung pada seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan 2 (dua) indikator dalam IKPA berada dalam pengelolaan unit kerja eselon III di luar Biro Keuangan. Namun, Biro Keuangan sebagai koordinator IKPA mengupayakan strategi dan mekanisme monitoring evaluasi atas pencapaian IKPA secara periodik, diantaranya menerbitkan rapor IKPA per triwulan ke unit kerja eselon II, menyampaikan *to-do-list* mingguan ke seluruh unit kerja, dan menindaklanjuti langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang berada dalam wewenang Biro Keuangan secara langsung. Hal ini perlu mendapat dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di DPR;
2. Pencapaian indikator kepuasan Anggota DPR atas layanan Biro Keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Keuangan. Dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran, Biro Keuangan harus mematuhi ketentuan yang berlaku, selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Anggota DPR, namun tetap mampu menjaga fleksibilitas. Inovasi selain identik dengan tujuan akhir yang diharapkan memberikan dampak positif bagi *stakeholders*, juga berpotensi menimbulkan

ketidaknyamanan pada tahap awal implementasi inovasi sehingga dibutuhkan dukungan dari *stakeholders* terutama Anggota DPR; dan

3. Dalam hal pencapaian indikator tata kelola aset, kesulitan yang dihadapi adalah proses inventarisasi (sensus atau pendataan barang milik negara). Sejak tahun 2022, Biro Keuangan telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu proses pelabelan sekaligus inventarisasi terhadap seluruh aset yang ada di lingkungan DPR. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat volume aset yang dimiliki oleh DPR RI sangat tinggi dan tersebar di berbagai lokasi baik di Jakarta maupun daerah. Selain itu, regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI juga perlu diperbaharui sejalan dengan perubahan aturan di bidang pengelolaan BMN serta perubahan SOTK Setjen DPR RI.

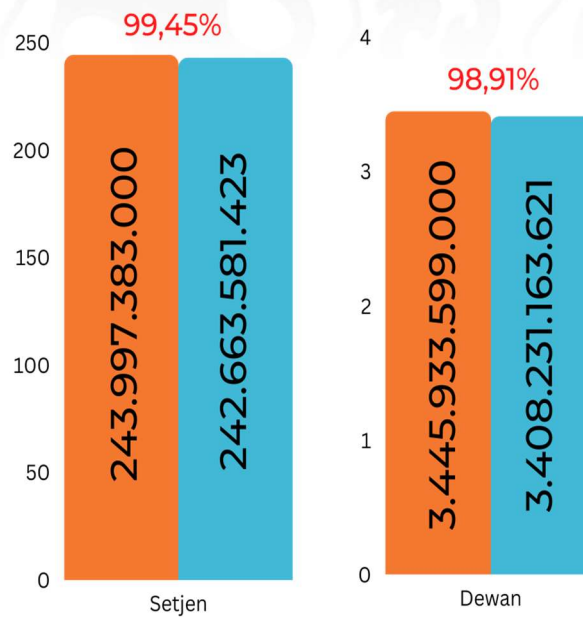
Dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran program/kegiatan tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian 5 (lima) indikator kinerja yang melebihi target dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target.

Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan



Dalam rangka mencapai kinerja, Biro Keuangan didukung oleh anggaran yang terdiri dari Satker Setjen sebesar Rp 243.997.383.000 dan Satker Dewan sebesar Rp 3.445.933.599.000 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi



Gambar 2. Realisasi Anggaran per Satker TA 2022

Secara umum, sasaran program Biro Keuangan telah berhasil dicapai dengan baik. Pencapaian kinerja didukung oleh strategi Biro Keuangan berikut ini:

1. Penguatan komitmen bersama jajaran Biro Keuangan beserta *stakeholders* untuk mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Upaya peningkatan kualitas dan kapasitas profesionalisme sumber daya manusia di jajaran Biro Keuangan;
3. Pengembangan sistem informasi dan teknologi layanan Biro Keuangan menuju era digitalisasi layanan Biro Keuangan;
4. Penyusunan dan penerapan regulasi dan tata laksana; dan
5. Pembangunan Zona Integritas Biro Keuangan dan Penerapan *tagline* Biro Keuangan #BerAKHLAK #BerSIH: Berorientasi pelanggan, Solutif, Inovatif, Handal.

Namun demikian, Biro Keuangan masih memiliki potensi yang dapat dioptimalkan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama untuk peningkatan kinerja Biro Keuangan selanjutnya, yaitu:

1. Peningkatan nilai IKPA dapat dicapai dengan adanya komitmen dan kesediaan *stakeholders* dalam menindaklanjuti instrumen yang diterbitkan oleh Biro Keuangan untuk mendukung pencapaian nilai IKPA;
2. Kepuasan *stakeholders* atas layanan Biro Keuangan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan *stakeholders* dan indikator yang menjadi penilaian dalam

survey kepuasan layanan Biro Keuangan. Diharapkan, penyesuaian antara kebutuhan dan indikator penilaian yang lebih terukur dan lebih mungkin tercapai dapat meningkatkan indeks kepuasan atas layanan Biro Keuangan;

3. Penguatan regulasi dan tata kelola di lingkungan Biro Keuangan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan mengikuti perubahan ketentuan aturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Merencanakan, menyusun kegiatan serta anggaran berdasarkan skala prioritas sehingga memudahkan jika terjadi realokasi anggaran serta pembatasan kegiatan;
5. Mempersiapkan Zona Integritas (ZI) Biro Keuangan dengan melakukan perbaikan serta inovasi di seluruh aspek pelayanan, administrasi dan regulasi agar dapat diajukan dan disetujui sebagai unit kerja pelaksana ZI;
6. Melakukan peningkatan kapasitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro Keuangan terhadap penguasaan hal-hal keuangan melalui pelatihan, pendidikan maupun sertifikasi;
7. Penggunaan teknologi informasi melalui *tagline* Biro Keuangan “Digit-*all* Keuangan” sehingga dapat memberikan kemudahan dalam mengolah, mengelola, mitigasi kesalahan, menyajikan informasi keuangan, dan menjadikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, hemat waktu dan biaya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pengaturan tentang kelembagaan Biro Keuangan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Peraturan Presiden tersebut tersirat bahwa dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Keuangan berada dibawah koordinasi Deputy Bidang Administrasi. Tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diterbitkan perubahan atas peraturan tersebut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

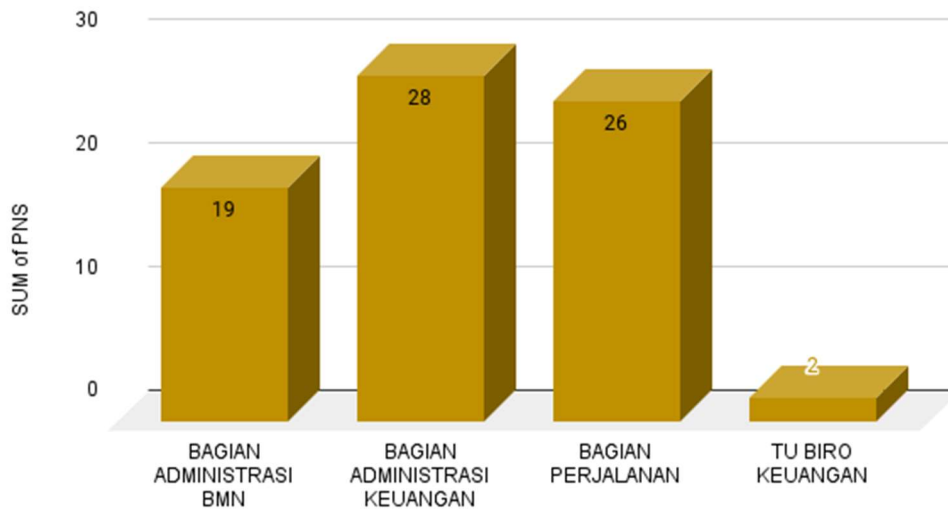
Biro Keuangan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

Dalam pelaksanaannya Biro Keuangan berkewajiban menyusun dan melakukan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas, melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan, melaksanakan pengelolaan barang milik negara, melaksanakan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, mendukung pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai unit kerja pendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Biro Keuangan berkewajiban memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Biro Keuangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022, Biro Keuangan didukung oleh 83 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

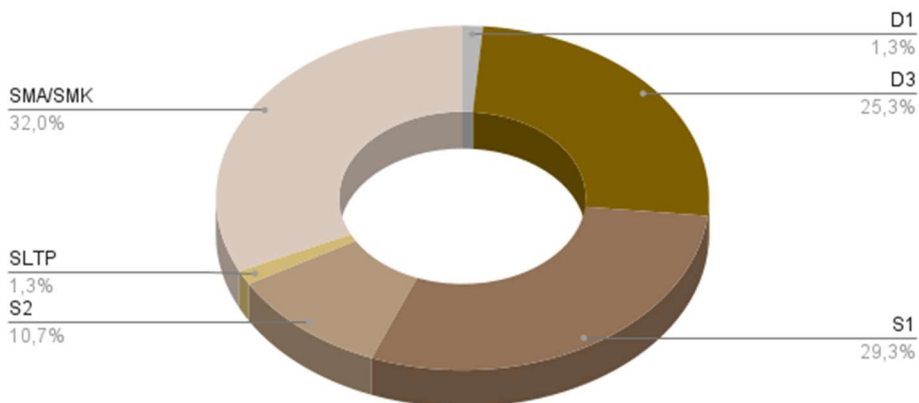
DATA PNS BIRO KEUANGAN



Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi tata kelola keuangan, Biro Keuangan terus menerus melakukan perbaikan baik dari sisi kualitas maupun kompetensi SDM-nya. Pada tahun 2022, kualitas SDM Biro Keuangan relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan PNS Biro Keuangan sebagai berikut:

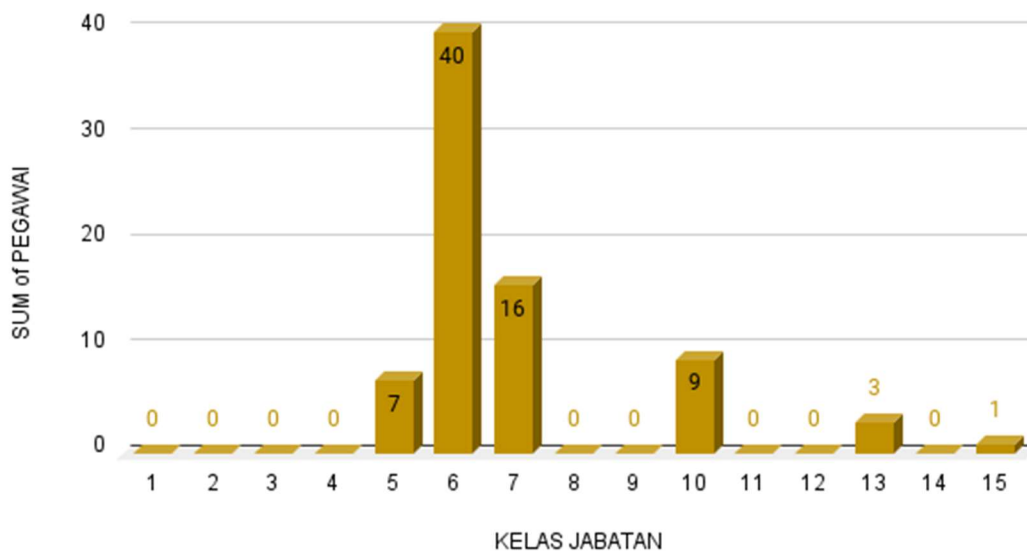
TINGKAT PENDIDIKAN PNS BIRO KEUANGAN



Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

Sedangkan menurut posisi jabatan, Biro Keuangan terdiri dari:

KELAS JABATAN PNS BIRO KEUANGAN

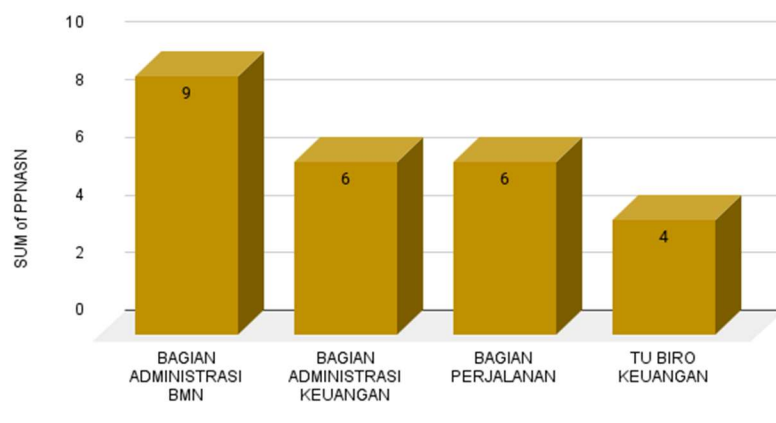


Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelas Jabatan

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

Pegawai ASN di Biro Keuangan selain didukung oleh PNS, juga didukung oleh 25 PPNASN yang ditempatkan di masing-masing unit kerja di lingkungan Biro Keuangan, yang terdiri dari:

PPNASN BIRO KEUANGAN



Gambar 6. Komposisi PPNASN Biro Keuangan

1.2. Dasar Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

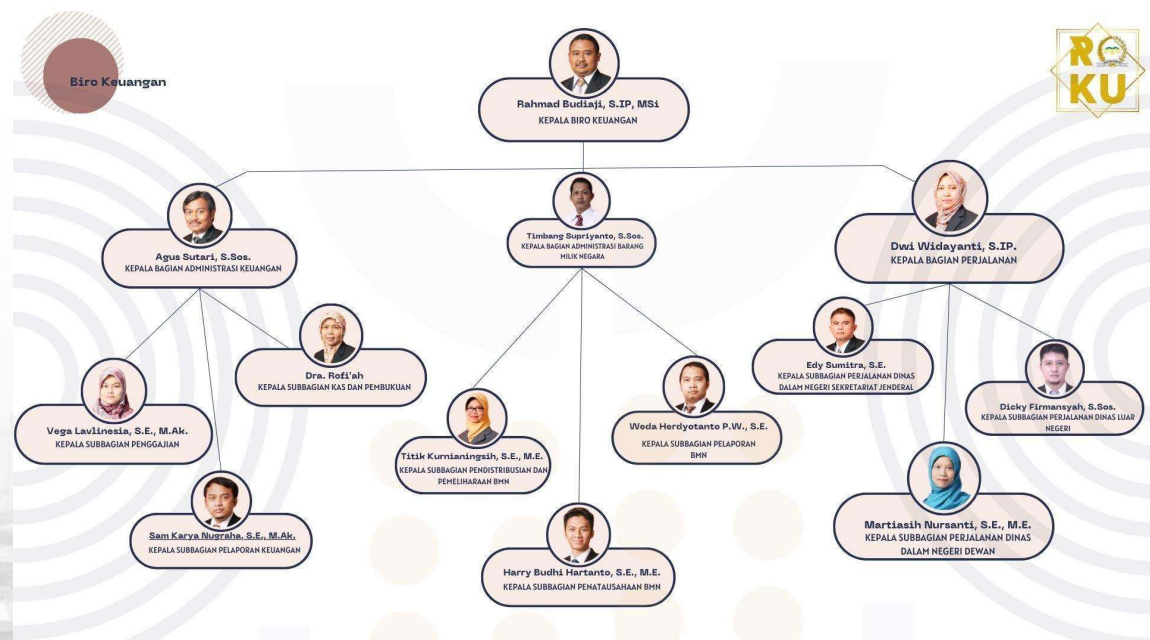
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021, Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas;
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan;
4. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
5. Pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
6. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 220, Biro Keuangan terdiri atas 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi Keuangan, Administrasi Barang Milik Negara, dan Bagian Perjalanan. Adapun struktur organisasi Biro Keuangan sebagai berikut:



Gambar 7. Struktur Organisasi Biro Keuangan

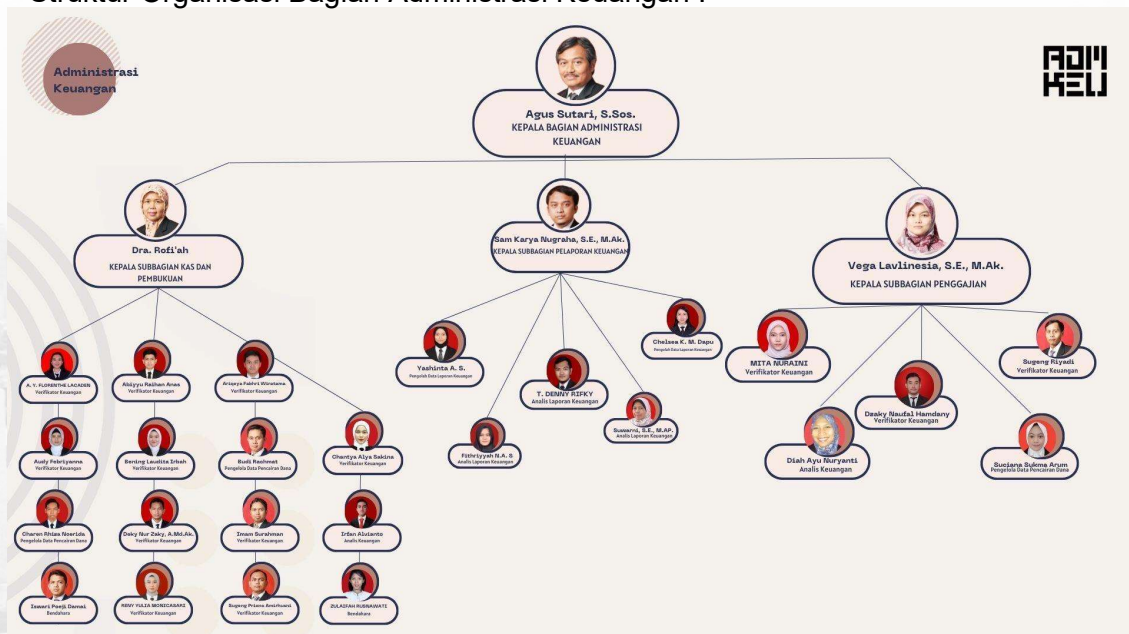
Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

A. Bagian Administrasi Keuangan

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penataan kas dan pembukuan, verifikasi, dan penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai aparatur sipil negara, staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara serta penyusunan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Keuangan;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keuangan dan
- Penyusunan laporan keuangan;
- Pelaksanaan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran;
- Pelaksanaan administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai aparatur sipil negara, staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara;
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Keuangan; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Keuangan.

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Keuangan :



Gambar 8. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Keuangan

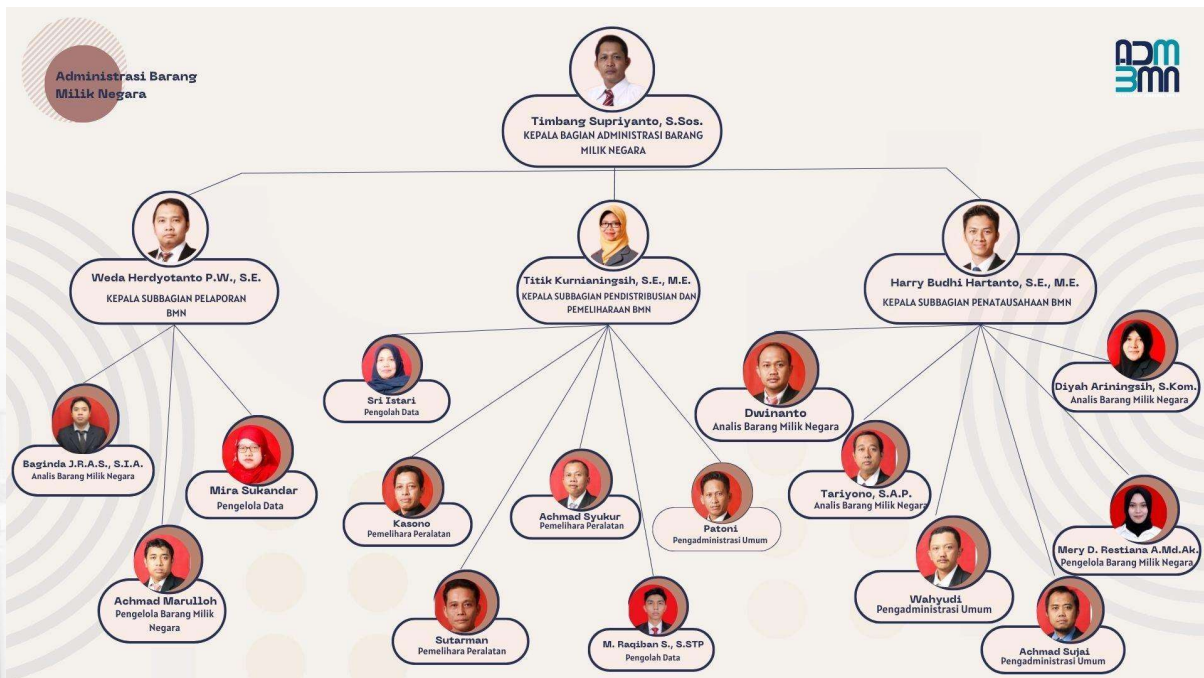
Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

B. Bagian Administrasi Barang Milik Negara

Bagian Administrasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Barang Milik Negara;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara;
- Perencanaan, pemanfaatan, dan penatausahaan Barang Milik Negara;
- Pendistribusian dan pemeliharaan Barang Milik Negara;
- Pelaporan Barang Milik Negara;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara; dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Keuangan

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Barang Milik Negara:



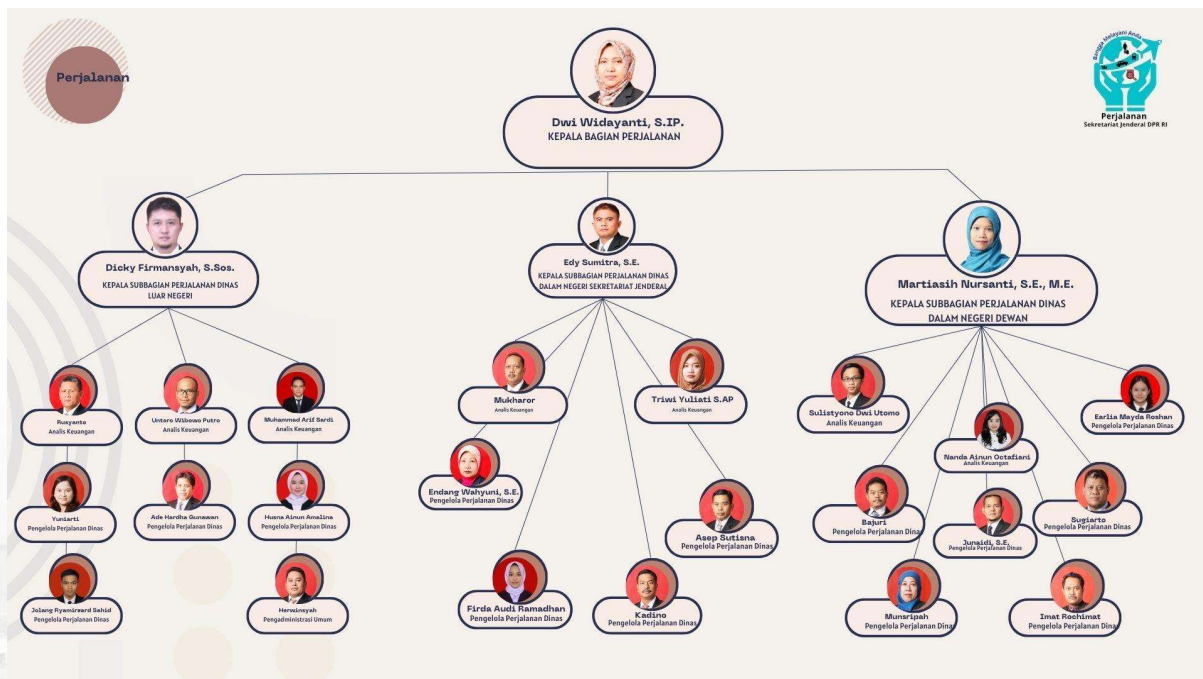
Gambar 9. Struktur Organisasi Bagian Administrasi BMN

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

C. Bagian Perjalanan

Bagian Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perjalanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perjalanan;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang perjalanan;
- Pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas dalam negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas dalam negeri kepada Sekretariat Jenderal;
- Pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas luar negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Keuangan.



Gambar 10. Struktur Organisasi Bagian Perjalanan Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan anggaran dan kinerja yang baik, Biro Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan potensinya sebagai pengelola anggaran dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya, pada tahun 2022, Biro Keuangan memiliki tantangan yang cukup beragam. Hal ini disebabkan kegiatan di DPR RI yang dinamis.

Dalam mencapai kinerja tahun 2022, Biro Keuangan menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan (IKPA) bergantung pada koordinasi seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Biro Keuangan sebagai koordinator IKPA memiliki tantangan untuk mengoptimalkan nilai IKPA. Namun untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Biro Keuangan dengan seluruh unit kerja. Menghadapi tantangan tersebut, mengupayakan strategi dan mekanisme monitoring evaluasi atas pencapaian IKPA secara periodik. Strategi tersebut meliputi penerbitan Raport IKPA per triwulan ke unit kerja eselon II, penyampaian to-do-list mingguan ke seluruh unit kerja, dan tindak lanjut langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang berada dalam wewenang Biro Keuangan secara langsung. Kegiatan-kegiatan ini tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di DPR;

2. Pencapaian Indikator Kepuasan Anggota DPR atas layanan Biro Keuangan bersamaan dengan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Pencapaian indikator ini menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Keuangan. Dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran, Biro Keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Anggota DPR, dan tetap menjaga fleksibilitas. Inovasi selain identik dengan tujuan akhir yang diharapkan memberikan dampak positif bagi stakeholders, juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di fase awal penerapan, sehingga dibutuhkan dukungan dari *stakeholders*, terutama Anggota DPR;

3. Terkait pencapaian Indikator Tata Kelola Aset memiliki kesulitan di dalam proses inventarisasi (sensus atau pendataan barang milik negara).

Sejak tahun 2022 Biro Keuangan telah menggunakan pihak ketiga untuk membantu proses pelabelan sekaligus inventarisasi terhadap seluruh aset yang ada di lingkungan DPR. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat volume aset yang dimiliki oleh DPR RI sangat tinggi dan tersebar di banyak lokasi baik di Jakarta maupun daerah. Selain itu regulasi terkait pengelolaan barang milik negara di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI juga perlu diperbaharui sejalan dengan perubahan aturan di bidang pengelolaan BMN.

Dalam menjawab tantangan strategis tersebut, Biro Keuangan berfokus pada 4 (empat) hal utama, yaitu:

1. Penguatan komitmen stakeholders;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Pengembangan sistem informasi; dan
4. Penerapan regulasi dan tata laksana.

2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan tahun 2022 merupakan dasar pelaksanaan kinerja Biro Keuangan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 11. Visi dan Misi Setjen DPR RI

Tabel 1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan SEKretariat Jenderal | | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| 2. | Terwujudnya Tata kelola pemerintahan di Setjen DPR Ri yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | | BB | A | A | AA |
| | | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja | | B | A | A | A |
| | | Opini BPK atas laporan keuangan | | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggara SPIP | | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| | | Hasil Penilaian Kapasitas APIP | | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| | | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK | | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | | Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B" | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | Hasil Pengawasan Kearsipan | | BB | A | A | A |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|------------|------------|-------------|
| | | Lembaga DPR | | | | | |
| | Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik | Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik | | Menuju Informatif | Informatif | Informatif | Informatif |
| | | Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik |

2.2. Aspek Strategis Organisasi

Tabel 2. Rencana Kerja Biro Keuangan Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|----------------------------|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Program Dukungan Manajemen | <p>01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas</p> <p>02 - Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>03 - Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI</p> <p>04 - Tercapainya target penguatan kelembagaan dan fungsi DPR RI melalui kebijakan internal dan penyerapan aspirasi</p> | <p>01.Indeks Pengelolaan Keuangan</p> <p>02.Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan</p> <p>03.Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>04.Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara</p> <p>05. Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan</p> | <p>01. persen</p> <p>02. Point</p> <p>03. Persen</p> <p>04. Persen</p> <p>05. Persen</p> | <p>01. 91</p> <p>02. 3,40</p> <p>03. 97</p> <p>04. 80</p> <p>05. 93</p> |
| | | | | | |

Dokumen Rencana Kerja Biro Keuangan yang terdiri dari 1 (satu) tujuan, 4 (empat) sasaran, 5 (lima) indikator kinerja beserta targetnya. Sudah sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI tahun (perubahan Struktur Organisasi) 2020 - 2024 yang merupakan dokumen 5 tahunan landasan awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Eselon II, yang didalamnya berisikan informasi berupa visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran strategis, target, program, dan kegiatan, serta menitikberatkan pada hasil.

2.3. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara

penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada.

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Keuangan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|----|--|-------------------|--|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan | 1. | Indeks Pengelolaan Keuangan | 91 |
| | | 2. | Indeks Pengelolaan Aset | 3,20 |
| | | 3. | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3,40 |
| | | 4. | persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 97% |
| | | 5. | persentase Tata Kelola Barang Milik Negara | 80% |
| | | 6. | persentase realisasi anggaran Biro Keuangan | 93% |

3. AKUNTABILITAS KINERJA

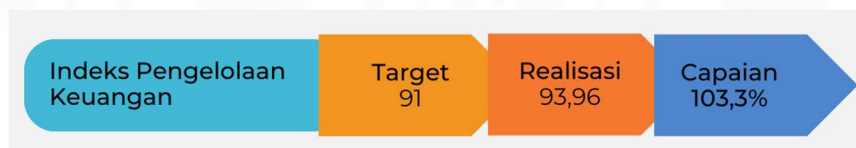
3.1. Capaian Kinerja Biro Keuangan

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2022

| Tujuan/ Sasaran | Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | |
| 1 | Indeks Pengelolaan Keuangan | 91 | 93,96 *) | 103,3% | Tercapai |
| 2 | Indeks Pengelolaan Aset | 3,20 | 3,59 | 112,9% | Tercapai |
| 3 | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3,40 | 3,35 | 98,53% | Tidak Tercapai **) |
| 4 | Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 97% | 99,90% | 102,27% | Tercapai |
| 5 | Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara | 80% | 85% | 106,30% | Tercapai |
| 6 | Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan | 93% | 99,45% | 106,94% | Tercapai |

3.2. Evaluasi Capaian Kinerja

A. Indeks Pengelolaan Keuangan



Gambar 12. Indeks Pengelolaan Keuangan

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA pada tahun anggaran 2020 dan 2021 memiliki 13 indikator yang berfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan anggaran, namun pada tahun anggaran 2021 terdapat perubahan bobot penilaian atas indikator data kontrak, penyelesaian tagihan dan capaian output.



Gambar 13. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pengelolaan Keuangan antar Tahun

Pada Tahun anggaran 2022 terdapat evaluasi capaian IKPA dan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output, sehingga IKPA pada tahun anggaran 2022 memiliki 8 indikator yang berfokus pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil

pelaksanaan anggaran. Reformulasi IKPA mempengaruhi perubahan tata cara penilaian yang dapat mengakibatkan perubahan nilai IKPA.

Pada tahun 2020 Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan mendapatkan nilai persentase 104,5%. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan persentase nilai IKPA yang hanya mencapai 96%. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kenaikan bobot penilaian atas indikator capaian output yang semula sebesar 5% menjadi 17%;
2. Indikator Hal. III DIPA mendapatkan relaksasi penilaian pada tahun 2020, karena pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021, relaksasi dicabut;
3. Penyampaian data kontrak ke KPPN dari masing-masing PPK melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak, dan
4. Penyampaian rencana penarikan dana oleh unit kerja tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.

Tabel 5. Indikator IKPA

| Indikator | Nilai | Bobot | Nilai Akhir |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Revisi DIPA | 100 | 10 | 10 |
| Deviasi Halaman III DIPA | 74,56 | 10 | 7,46 |
| Penyerapan Anggaran | 96,29 | 20 | 19,26 |
| Belanja Kontraktual | 86,63 | 10 | 8,66 |
| Penyelesaian Tagihan | 93,05 | 10 | 9,31 |
| Pengelolaan UP dan TUP | 98,82 | 10 | 9,88 |
| Dispensasi SPM | 100 | 5 | 5 |
| Capaian Output | 97,6 | 25 | 24,44 |
| Total | | 93,96 | |

Berdasarkan nilai IKPA dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 di Aplikasi Monev PA, nilai IKPA DPR RI mencapai 93,96 dengan predikat nilai IKPA, Baik. Berdasarkan nilai yang didapat dan menjadi tanggung jawab nilai IKPA Biro keuangan, Indikator Penyelesaian tagihan (9,31), penyerapan anggaran (19,26), pengelolaan UP dan TUP (9,88), serta dispensasi SPM (5) mendapatkan nilai yang baik di akhir tahun anggaran 2022. Namun untuk indikator Deviasi Hal. III DIPA dan indikator belanja kontraktual mendapat nilai yang kurang baik. Menurunnya nilai IKPA

untuk 2 indikator ini disebabkan kurangnya unit kerja dan Biro Keuangan memantau target realisasi per triwulan yang ada di Hal. III DIPA serta ada beberapa kontrak di Satker Dewan yang terlambat didaftarkan melebihi 5 hari kerja sehingga mengurangi nilai IKPA untuk indikator Belanja kontraktual.

Pada tahun 2022 Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 7,03%. Kenaikan tersebut didorong dengan kegiatan/program yang dilakukan Biro Keuangan dalam rangka menunjang perbaikan pengelolaan keuangan bagi unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, kegiatan/program tersebut antara lain:

1. Mengadakan *coaching clinic* kepada staf PPK dan unit kerja

Biro Keuangan mengadakan *coaching clinic* kepada staf PPK dan unit kerja dengan tujuan mereshuffle kembali pengetahuan *stakeholder* Biro Keuangan terutama staf PPK dan unit kerja terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan sehari-hari, seperti pertanggungjawaban berkas keuangan, pelaksanaan dan penginputan TIM, pengelolaan pajak, penggunaan aplikasi keuangan serta kedisiplinan terhadap tenggat waktu pelaksanaan anggaran yang harus dijaga dan disesuaikan dengan nilai IKPA tahun anggaran 2022.

2. Sosialisasi Langkah-langkah strategis, IKPA dan Langkah-langkah akhir tahun

Dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai IKPA agar tetap tinggi, Biro Keuangan mengadakan beberapa sosialisasi yang tidak hanya mengundang para staf tapi juga mengundang sampai level Eselon 1, Eselon 2 serta Pejabat perbendaharaan seperti PA, KPA, PPK dan PPSPM yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Sosialisasi yang dilakukan di tahun 2022 antara lain sosialisasi Langkah-langkah strategis, rapor IKPA per triwulan serta sosialisasi Langkah-langkah akhir tahun.

3. Pembuatan Infografis IKPA

Selain adanya sosialisasi, Biro Keuangan juga mencetak infografis yang disebar saat sosialisasi serta menyebarkannya ke beberapa channel informasi seperti Portal Setjen DPR RI dan Instagram. Infografis ini diharapkan dapat memudahkan unit kerja untuk membacanya serta sadar terhadap Batasan-batasan yang harus dijaga dalam mempertahankan nilai IKPA di setiap indikator.

4. Peningkatan Kompetensi pegawai

Salah satu aspek penunjang yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai IKPA di setiap tahunnya adalah dengan meningkatkan kompetensi pegawai Biro Keuangan dengan mengadakan sertifikasi Bendahara Pengeluaran. Di tahun 2022, Biro Keuangan mengadakan sertifikasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada 11 pegawai dengan tujuan meningkatkan tingkat akurasi terhadap pemeriksaan dan pertanggungjawaban berkas keuangan.

5. Pengiriman IKPA mini dan *to do list* mingguan

Untuk melakukan monitoring dan kesadaran unit kerja terhadap nilai-nilai indikator IKPA yang harus dijaga, Biro Keuangan mengirimkan IKPA mini setiap bulan ke unit kerja di bawah eselon 2 agar bisa menjaga dan mengawasi setiap indikator yang dianggap lemah serta mempertahankan nilai yang sudah baik. Selain itu Biro Keuangan juga mengirimkan *to do list* mingguan kepada staf PPK agar bisa menyelesaikan tagihan yang sudah mendekati tenggat waktu dan harus diselesaikan oleh unit kerja dengan tujuan optimalisasi laporan keuangan dan peningkatan penilaian kinerja.

Tabel 6. Indeks Pengelolaan Keuangan

| Indikator | Capaian 2022 | Target Akhir 2024 | Tingkat Kemajuan |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Indeks Pengelolaan Keuangan | 93,96 | 94 | 99,9 |

Capaian indikator indeks pengelolaan keuangan tahun 2022 mencapai 93,96%. Dalam target jangka menengah tahun 2024, capaian indikator indeks pengelolaan keuangan diharapkan mampu mencapai angka 94%.

Dalam meningkatkan indikator indeks pengelolaan keuangan, Biro Keuangan akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melakukan pencatatan pada setiap awal bulan dan monitoring secara berkala untuk unit kerja yang memiliki kontrak;
2. Mengembangkan sistem informasi dengan pengembangan aplikasi Semar, untuk dapat memberikan notifikasi bagi setiap user dalam hal pekerjaan yang belum diselesaikan maupun rencana penarikan dana yang belum terealisasi;

3. Menyediakan layanan informasi *Whatsapp Business* bagi seluruh pegawai yang memerlukan informasi berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan/atau pelayanan hak-hak keuangan di Biro Keuangan;
4. Melakukan update SOP Pelayanan seperti SOP pembayaran UP, SOP pembayaran LS, SOP Pengelolaan pajak dan SOP pelaksanaan anggaran lainnya;
5. Perluasan penggunaan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) untuk perjalanan dinas yang awalnya digunakan hanya untuk pembelian BBM saja;
6. Penerbitan SE berkas pertanggungjawaban dengan tujuan efektivitas berkas pertanggungjawaban yang harus di verifikasi dan disimpan oleh setiap pejabat perbendaharaan;
7. Pembuatan dan pengiriman Mosaik bulanan untuk informasi dan apresiasi nilai IKPA kepada unit kerja yang berprestasi mempertahankan nilai IKPA dengan baik;
8. Melakukan coaching clinic di setiap bulan, sosialisasi, infografis, peningkatan kompetensi pegawai dan penyampaian IKPA mini serta *to do list* mingguan sebagaimana telah dilaksanakan pada Tahun 2022.

Tabel 7. Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan

| Indikator | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Indeks Pengelolaan Keuangan | 4.985.262.000,- | 4.985.175.894,- | 99,99% |

Dalam mencapai indikator Indeks Pengelolaan Keuangan (IKPA), Biro Keuangan didukung oleh sumber daya anggaran sebesar Rp4.985.262.000,-. Sumber daya anggaran digunakan dengan optimal sebesar Rp4.985.175.894,- atau 99,99% untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pendampingan ke para pengelola anggaran di DPR, berkoordinasi intensif dengan mitra kerja, pengembangan sistem informasi yang mendukung monitoring evaluasi pencapaian IKPA secara periodik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan anggaran, dan memperkuat SOP serta peraturan-peraturan internal yang mendukung tercapainya target indikator ini. Indikator IKPA ditargetkan tercapai 91%, dan berhasil dilampaui sampai dengan 103%, atau dengan kata lain DPR mendapatkan nilai IKPA 93,96%.

Tabel 8. Realisasi dan Standar Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan

| Indikator | Realisasi 2022 | Standar Nasional | % Capaian |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Indeks Pengelolaan Keuangan | 93,62 | 93,14* | 100,51 |

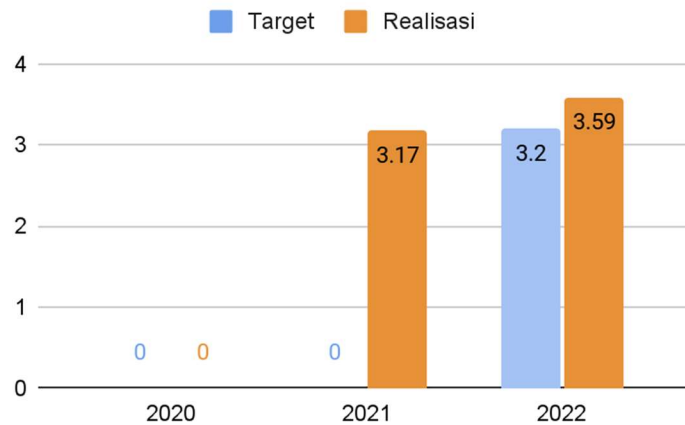
Berdasarkan nilai IKPA nasional sampai dengan triwulan III tahun 2022, nilai IKPA DPR RI sebagai lembaga negara mendapatkan nilai 93,62 jika dibandingkan dengan nilai nasional yang mencapai 93,14 nilai IKPA DPR RI mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Data yang didapatkan, DPR RI mendapat peringkat 17 dari 80 Kementerian atau Lembaga di seluruh Indonesia dengan predikat nilai baik. Capaian ini jika dibandingkan dengan dengan nilai IKPA nasional masih tergolong baik karena melebihi nilai rata-rata IKPA nasional berdasarkan triwulan III tahun 2022. Kedepannya nilai IKPA DPR RI harus terus ditingkatkan terutama untuk beberapa indikator seperti Deviasi Hal. III DIPA dan belanja kontraktual agar bisa mendapatkan predikat nilai yang lebih baik lagi.

B. Indeks Pengelolaan Aset



Gambar 14. Indeks Pengelolaan Aset

Keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset tahun 2022 didasari oleh 8 parameter penunjang. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan Indikator Kinerja Pengelolaan BMN yang digunakan oleh Kementerian PAN RB sebagai salah satu penilaian Reformasi Birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga sejak tahun 2021. Hasil dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tersebut dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata kelola BMN untuk mencapai tujuan sebagai Distinguished Asset Manager, dan bagi Pengguna Barang dapat melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan.



Pada tahun 2022, Biro Keuangan menargetkan indikator IPA sebesar 3,2 dari skala 4. Sedangkan realisasi di tahun 2022 melampaui target dengan nilai IPA sebesar 3,59 dengan capaian sebesar 112,9%. Peningkatan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 13,2% menandakan bahwa Biro Keuangan dapat mengefektifkan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga mendapatkan output yang lebih besar.



Pada tahun 2022 dalam Renstra belum ada indikator Indeks Pengelolaan Aset dikarenakan Indeks Pengelolaan Aset baru dikeluarkan oleh Kementerian keuangan pada Tahun 2021, dan juga pada tahun 2021 IPA baru dijadikan indeks antara reformasi birokrasi. Sehingga belum masuk menjadi target jangka menengah pada renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2021-2024. Di Renstra berikutnya Biro Keuangan akan memasukkan IPA sebagai bagian dari capaian kinerjanya.

Keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset tahun 2022 didasari oleh 8 parameter penunjang, masing-masing penunjang Indeks Pengelolaan Aset memiliki bobot yang berbeda diantaranya :

- A. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L memiliki bobot 5%,
- B. Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN memiliki bobot 10 persen, sedangkan

C. Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN, Asuransi BMN, Tindak Lanjut pengelolaan BMN, Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan memiliki bobot 15%.

Keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu proses yang dilewati oleh suatu organisasi. Hasil capaian realisasi yang diperoleh Biro Keuangan tidak lepas dari unit kerja yang langsung melakukan kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara.

Tabel 9. Parameter Indeks Pengelolaan Aset

| No | Parameter | Bobot | Indeks | Indeks |
|----|--|-------|--------|--------|
| 1 | Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L | 5% | 4,00 | 0,20 |
| 2 | Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN | 15% | 4,00 | 0,60 |
| 3 | Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN | 10% | 3,40 | 0,34 |
| 4 | Asuransi BMN | 15% | 4,00 | 0,60 |
| 5 | Tindak lanjut pengelolaan BMN | 15% | 3,50 | 0,53 |
| 6 | Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN | 15% | 4,00 | 0,60 |
| 7 | Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan | 15% | 4,00 | 0,60 |
| | Total | | | 3,59 |

Dari 8 parameter indeks Pengelolaan Aset tersebut 5 diantaranya mendapatkan nilai sempurna, yaitu Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L, Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN, Asuransi BMN, Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN dan Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan masing-masing memperoleh indeks 4,00 sedangkan untuk Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN memperoleh indeks 3,40 sedangkan Tindak Lanjut pengelolaan BMN memperoleh 3,50.

Dari kedelapan aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indeks pengelolaan Aset meningkat dari tahun sebelumnya, adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan Indeks Pengelolaan Aset yaitu:

- Tanggapnya Biro Keuangan dalam penyelesaian Temuan BPK yang masuk kedalam LKPP
- Membangun kerjasama yang baik dengan aparat pengawas internal pemerintah
- Memperbaharui kontrak seluruh pemanfaatan aset berupa sewa menyewa
- Mengasuransikan aset berupa gedung dan bangunan
- Tindak lanjut pengelolaan BMN berupa penghapusan dan pemindahtangan mengalami kenaikan.
- Dokumen kepemilikan untuk BMN berupa aset telah seluruhnya selesai disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Secara umum pencapaian target organisasi tergantung kepada banyak hal. Berikut adalah program ataupun kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Biro Keuangan yang menunjang pencapaian kinerja untuk Indeks Pengelolaan Aset diantaranya :

- a. Pelaksanaan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan, semester dan tahunan dengan unit kerja pengelola BMN;
- b. Koordinasi dan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam membantu penyelesaian TLHP yang masih belum tuntas serta reviu baik itu terhadap RKBMN, MOU dari pemanfaatan maupun Laporan BMN;;
- c. Pelatihan maupun bimbingan teknis untuk internal maupun eksternal kepada stakeholder serta counterpart Biro Keuangan;
- d. Persiapan asuransi Barang Milik Negara sebelum tahun anggaran terkini

Kegiatan diatas telah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu pencapaian target kinerja Biro Keuangan.

Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset di tahun 2022, Biro Keuangan didukung oleh bagian administrasi BMN dengan anggaran yang terbatas dan sudah terealisasi sebesar 99,96% mampu menjalankan serta menunjang indeks pengelolaan aset dengan mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Selain itu dengan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas, Biro Keuangan mampu memaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Untuk mencapai peningkatan nilai IPA perlu didukung dengan:

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel 10. Perbandingan Kondisi SDM, Sumber Dana dan Sarpras

| Kondisi Ideal | Kondisi Saat Ini | Kekurangan/Kelebihan | Tindak Lanjut |
|---|--|--|--|
| Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam analisa jabatan | Jumlah SDM belum sesuai persyaratan analisa jabatan | Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai | Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan. Selain itu juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan yang berskala besar |
| Anggaran yang dapat menunjang pengelolaan Barang Milik Negara | Saat ini anggaran belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang besar | Masih membutuhkan anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran Biro Keuangan | Mengajukan penambahan anggaran pada periode penganggaran di tahun berikutnya |
| Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kerja di lapangan | Sarana prasarana yang mendukung operasional di lapangan khususnya kegiatan inventarisasi serta pelabelan | Masih membutuhkan prasarana berupa peralatan pembuat label portable | Mengajukan anggaran pengadaan dengan berkoordinasi dengan biro terkait |

Tabel 9. Indeks Pengelolaan Aset

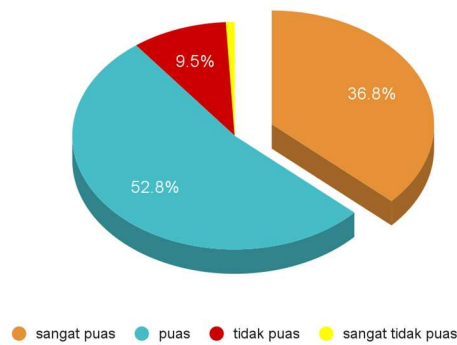
C. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan



Gambar 16. Indeks Kepuasan Layanan

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan mencakup layanan administrasi keuangan dan layanan administrasi perjalanan dinas. Berdasarkan laporan hasil survey 2022, diperoleh data sebagai berikut :

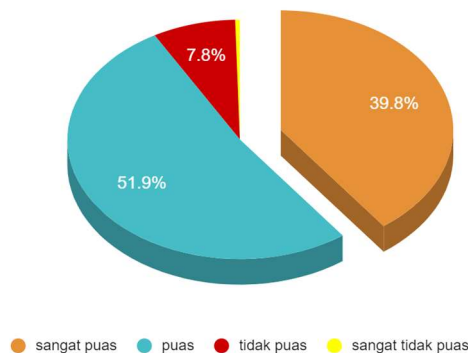
Bagian Administrasi Keuangan



Gambar 17. Laporan Hasil Survey Bagian Administrasi Keuangan

Untuk layanan administrasi keuangan, jumlah responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 85 responden atau 36,80 persen dari 231 responden dan menyatakan puas sebanyak 122 responden atau 52,81 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 22 responden atau 9,52 persen, dan responden yang menyatakan sangat tidak puas 2 responden atau 0,87 persen. Nilai indeks kualitas dan ketepatan Setjen dalam memberikan layanan administrasi keuangan sebesar 3,26 dengan nilai interval konversi 81,39 dan masuk kategori “Baik”.

Bagian Perjalanan



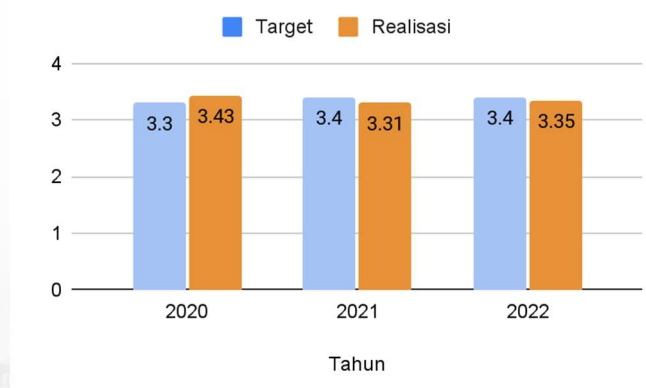
Gambar 18. Laporan Hasil Survey Bagian Perjalanan

Untuk layanan administrasi perjalanan dinas, jumlah responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 92 responden atau 39,83 persen dari 231 responden dan menyatakan puas sebanyak 120 responden atau 51,95 persen. Semenatra responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 18 responden atau 7,79%, dan responden yang menyatakan sangat tidak puas sebanyak 1 responden atau 0,43 persen. Nilai indeks kualitas dan ketepatan Setjen dalam memberikan layanan administrasi

perjalanan dinas sebesar 3,31 dengan nilai interval konversi 82,79 dan masuk kategori “Baik”.

Target yang ditetapkan dalam indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan mencapai 3,40 belum mencapai kata memuaskan dalam hal pencapaian yang baru mencapai nilai sementara 3,35. Berdasarkan survei yang dilakukan ada beberapa penilaian yang dilakukan terhadap kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan Biro Keuangan yaitu, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian produk spesifikasi dan jenis layanan yang belum mencapai kata puas terhadap hasil yang didapat.

| Tujuan/Sasaran | | | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI Yang Berkualitas | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| Indikator Kinerja | | | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | | |
| 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
| Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 3,3 | 3,43 | - | 3,4 | 3,31 | 97,4 | 3,4 | 3,35 | 98,5 |



Gambar 19. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kepuasan Anggota DPR RI antar Tahun

Pada tahun 2021, terjadi penurunan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan sebesar 0,12. Hal ini disebabkan oleh adanya peralihan media pengajuan kegiatan Anggota DPR RI akibat pandemi Covid-19. Media pengajuan kegiatan Anggota yang semula menggunakan surat dan ditujukan langsung ke Bagian Perjalanan, dialihkan dengan menggunakan email, mengakibatkan email pengajuan

tidak diproses dikarenakan kesalahan alamat email tujuan dan *human error* karena rentan terlewat.

Disamping itu, pengajuan kegiatan Anggota juga masih harus disampaikan baik melalui Bagian Administrasi Keuangan maupun melalui Bagian Perjalanan, namun ketika terjadi pembatalan kegiatan, seringkali TA/SAA hanya mengajukan pembatalan kepada salah satu bagian. Hal ini mengakibatkan terjadinya pembayaran pada kegiatan yang seharusnya dibatalkan dan dokumen Bagian Perjalanan dan/atau Bagian Administrasi Keuangan terkait kegiatan Anggota menjadi tidak relevan.

Pada tahun 2022, terjadi kenaikan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan sebesar 0,04. Kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan oleh dua faktor yang menjadi penunjang kenaikan dan penurunan nilai indeks.

Faktor yang mendorong kenaikan indeks pada tahun 2022 adalah gagasan Biro Keuangan untuk dapat meminimalisir risiko pada tahun 2021, yaitu dengan menerapkan proses pengajuan melalui satu pintu, yaitu melalui email Biro Keuangan yang dapat diakses langsung oleh dua bagian yaitu Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Perjalanan. Tahap pertama dilakukan oleh Bagian Perjalanan, yang memastikan bahwa pengajuan kegiatan Anggota DPR RI tidak terkena matriks dengan kegiatan perjalanan dinas lainnya. Tahap kedua dilakukan oleh Bagian Administrasi Keuangan untuk melakukan pencatatan dan pembayaran dana kegiatan berdasarkan data dari Bagian Perjalanan. Berdasarkan hasil analisis perubahan alur proses pengajuan, cukup meminimalisir risiko adanya miss komunikasi antara Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Perjalanan dalam memproses pengajuan dan pembatalan kegiatan Anggota DPR RI, karena pembayaran harus dilakukan beriringan baik dana kegiatan maupun perjalanan dinas.

Disamping itu, Biro Keuangan juga menggagas mekanisme pembayaran dana kegiatan Anggota melalui metode *cashless* atau transfer. Gagasan ini tentunya menuai pro dan kontra bagi para Anggota DPR RI, salah satunya adalah karena tidak tersedianya ATM di daerah pemilihan tertentu, membuat beberapa Anggota DPR RI kesulitan untuk melakukan penarikan dana dan pembayaran ini belum memberikan notifikasi bagi para Anggota DPR RI ketika dana kegiatan sudah ditransfer, sehingga TA/SAA masih perlu mengkonfirmasi pembayaran ke Bagian Administrasi Keuangan. Dalam menindaklanjuti kelemahan ini, sementara penanggung jawab dana kegiatan di Bagian Administrasi Keuangan memberikan informasi transfer di *group whatsapp*

dengan TA/SAA Anggota DPR RI. Meski demikian, tidak sedikit TA/SAA masih menanyakan kembali mengenai status pengajuan Anggota-nya.

Tabel 11. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI

| NO | Tujuan /Sasaran | Indikator | Capaian 2022 | Target Akhir 2024 | Tingkat Kemajuan |
|-----------|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola di Setjen DPR RI yang berkualitas | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3.35 | 3,43 | 97,7 |

Walaupun indeks kepuasan layanan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Keuangan Tahun 2022, namun capaian indeks sebesar 3,35% sebenarnya telah melampaui target indeks kepuasan layanan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Dalam target jangka menengah tahun 2024, capaian indikator indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan diharapkan mampu mencapai angka 3,24.

Pada tahun 2023 Biro Keuangan akan melakukan beberapa program/kegiatan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada Anggota DPR RI, diantaranya:

1. Menciptakan Aplikasi pengajuan perjalanan dinas dan dana kegiatan Anggota DPR RI, agar proses pengajuan lebih terstruktur dan terintegrasi antara Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Perjalanan, serta dapat dimonitoring secara langsung baik oleh Anggota DPR RI/TA, Verifikator, User Pembayaran maupun Bendahara;

2. Menyediakan layanan informasi *Whatsapp Business* bagi seluruh Anggota DPR RI, dan nantinya bisa memberikan *broadcast* pemberitahuan dan/atau notifikasi ketika dana kegiatan sudah ditransfer.

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Satker Dewan

| Indikator | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|---|-------------------|---------------------|-----------|
| Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3.445.933.599.000 | 3.408.231.163.621,- | 98,91% |

Biro Keuangan mengelola anggaran untuk 2 (dua) satuan kerja (satker), yaitu satker Setjen dan satker Dewan. Anggaran satker Dewan yang dikelola oleh Biro Keuangan digunakan untuk mendukung Anggota DPR menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan aspirasi rakyat, termasuk hak-hak keuangan Anggota DPR. Anggaran ini dapat menjadi indikator kepuasan Anggota DPR atas layanan Biro Keuangan, salah satunya layanan pembayaran hak-hak keuangan anggota dan kegiatan aspirasi masyarakat. Dengan potensi sumber daya anggaran sebesar Rp3.445.933.599.000,- telah terealisasi sebesar Rp3.408.231.163.621,- atau sebesar 98,91%, dapat diartikan Biro Keuangan mampu memberikan pelayanan kepada Anggota DPR dengan optimal. Adapun tidak tercapainya target indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan, disebabkan oleh perubahan sistem pembayaran menjadi *cashless*.

D. Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah



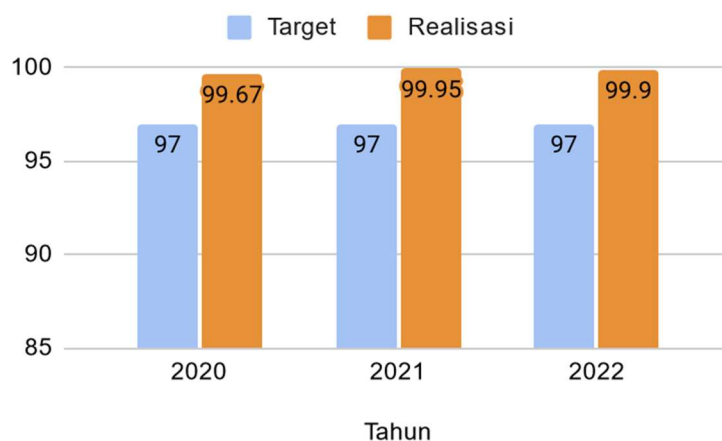
Gambar 20 Indeks Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Pada Tahun 2022, Biro Keuangan menargetkan tingkat kesesuaian pencatatan transaksi sebesar 97% dari total belanja modal. Dengan pagu belanja modal DPR RI mencapai Rp333.821.615.000,00 dan realisasi belanja modal mencapai Rp333.586.227.389,00 atau mencapai 99,93% dari pagu, maka toleransi ketidaksesuaian pencatatan transaksi hanya mencapai Rp10.007.586.821,67

Selama Tahun 2022, berdasarkan data pada Aplikasi SAKTI, diketahui kesalahan pencatatan belanja yang teridentifikasi dalam aplikasi adalah sebesar Rp343.752.570,00 atau mencapai 0,10% dari total realisasi belanja modal. Data ketidaksesuaian pencatatan transaksi disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Ketidaksesuaian Pencatatan Transaksi

| Uraian | Nilai |
|--|----------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin Teridentifikasi Persediaan | Rp196.504.000 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin teridentifikasi Aset Ekstrakomptabel | Rp24.461.070 |
| Belanja Persediaan tidak membentuk persediaan | Rp122.787.500 |
| Total | Rp343.752.570 |



Gambar 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kesesuaian Pencatatan Transaksi antar Tahun

Jika melihat perkembangan data sejak tahun 2020, tingkat kesesuaian pencatatan transaksi dengan standar menunjukkan hasil yang konsisten. Biro Keuangan, melalui penggunaan Aplikasi SAKTI, telah berhasil menjaga kesesuaian pencatatan transaksi pada level 99%. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 target untuk kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah masih tetap berada pada nilai 97. Pada tahun 2021, capaian realisasi 99,95%. Sementara untuk tahun 2022 target yang ditetapkan juga sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 97% dengan realisasi 99,90 atau dengan capaian 102,99%. Pada tahun 2022, Indeks Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah mengalami penurunan dalam realisasinya sebesar 0.05%. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya salah akun dalam pencatatan transaksi. Untuk mengurangi kesalahan pencatatan akun, Biro Keuangan secara berkala melakukan rekonsiliasi internal dan juga eksternal dengan KPPN.

Berdasarkan data yang ada, jika dibandingkan dengan capaian dalam rencana strategis Setjen DPR RI, Biro Keuangan telah berhasil mencapai target dalam renstra yaitu:

Tabel 14. Indeks Kesesuaian Pencatatan Transaksi

| Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Target Akhir | Tingkat Kemajuan |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| Kesesuaian | 99,90% | 98% | 101,94% |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Pencatatan Transaksi | | | |
|-------------------------|--|--|--|

Keberhasilan Biro Keuangan dalam mencapai tingkat kesesuaian pencatatan transaksi sesuai standar, tidak lepas dari dukungan seluruh Stakeholder yang ada. Sejak tahun 2021, Biro Keuangan telah menjadi Peserta Piloting Aplikasi SAKTI Full Modul, sehingga memastikan bahwa penggunaan dan pencatatan transaksi telah sesuai dengan ketentuan. Selain penggunaan Aplikasi SAKTI, beberapa program yang turut mendukung keberhasilan pencapaian ini antara lain:

- a. Melaksanakan bimtek kepada seluruh staf PPK terkait penggunaan akun dan pemilihan kode barang
- b. Melaksanakan pendidikan bagi pegawai/staf Pelaporan Keuangan dan BMN
- c. Melakukan verifikasi awal atas tagihan yang dikirimkan oleh unit kerja, terutama untuk tagihan belanja persediaan dan belanja modal
- d. Melakukan rekonsiliasi internal antara data keuangan dan data BMN sebagai langkah awal penemuan koreksi atas kesalahan akun yang terjadi.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan tagihan dan pemberian rekomendasi koreksi oleh Tim PIPK

Dalam rangka peningkatan kesesuaian pencatatan transaksi sesuai dengan standar, terdapat beberapa program yang belum berhasil terlaksana dengan baik, antara lain:

- a. Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan anggaran secara realtime yang sudah terkoneksi dengan SAKTI. Saat ini, pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara manual berdasarkan penarikan data pada aplikasi Monsakti. Namun demikian, cara ini dirasakan kurang optimal karena kesalahan yang telah terjadi sudah sulit diperbaiki;
- b. Penyediaan akun khusus pengadaan aset ekstrakomptabel yang belum diakomodir dalam perencanaan, sehingga unit kerja yang melakukan pengadaan aset ekstrakomptabel masih menggunakan akun belanja barang biasa maupun menggunakan akun belanja modal;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelaahan akun bersamaan dengan proses perencanaan maupun pengajuan anggaran.

Pada Tahun 2022, Dalam rangka mencapai tingkat kinerja yang optimal, Biro Keuangan menggunakan anggaran sebagai berikut:

Tabel 15. Penggunaan Anggaran Pelaporan

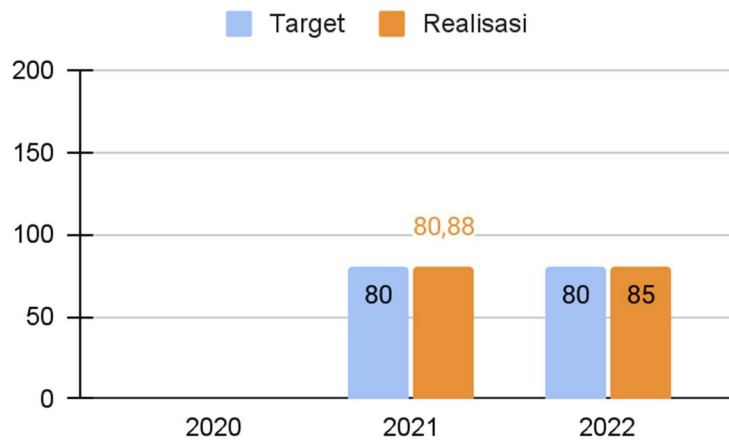
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Pelaporan Keuangan | 305.498.000 | 305.483.750 | 100% |
| Pelaporan Lainnya | 681.598.000 | 680.169.500 | 99,79% |
| Pelaporan BMN | 398.107.000 | 398.107.000 | 100% |
| Total | Rp1.385.203.000 | Rp1.383.760.250 | 99,90% |

E. Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara



Gambar 22. Persentase Tata Kelola BMN

Dalam pengelolaan BMN, target indikator yang ditetapkan adalah sebesar 80% dan tercapai sebesar 85% pada tahun 2022. Ini berarti ada pencapaian sebesar 106,3%. Pencapaian tersebut tentunya berkat kerja sama seluruh unit kerja dalam mendukung tata kelola BMN dan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal antara lain Kementerian Keuangan.



Pada tahun 2020 Presentase Tata Kelola belum ditetapkan sebagai indikator kinerja. Mulai Tahun 2021 terdapat target sebesar 80% dan realisasinya sebesar 80,88%, sehingga pencapaian tahun 2021 yaitu sebesar 101,1%. Sedangkan di tahun 2022 ditetapkan target yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 80% dan realisasinya sebesar 85%, pencapaian tahun 2022 yaitu sebesar 106,3%.



F. Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan

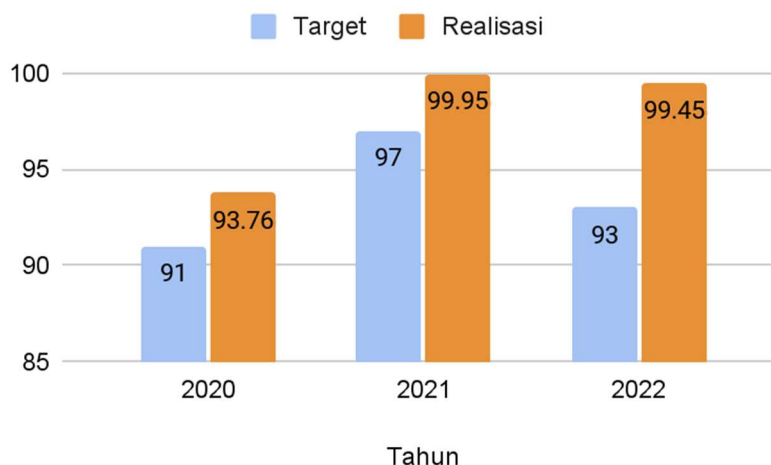


Gambar 23. Persentase Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Biro Keuangan yang targetnya berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 93%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,45%. Dengan demikian persentase pencapaian sebesar 106,94% dari target yang ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, realisasi anggaran Biro Keuangan di tahun 2022 harus dapat terserap dengan maksimal. Biro Keuangan melakukan beberapa pendekatan agar bisa memaksimalkan realisasi anggaran di tahun 2022. Revisi anggaran dan penyusunan *cash planning* dan pergeseran waktu kegiatan menjadi pendekatan yang dilakukan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Sebelum melakukan revisi dan realokasi, Biro Keuangan melakukan analisa dan identifikasi mendalam terhadap akun-akun yang berpotensi tidak terserap dengan baik.

Sesuai dengan target indikator lain yang ada di dalam perjanjian kinerja, revisi dan realisasi anggaran dikhususkan agar bisa mencapai target kinerja dari setiap indikator kinerja yang ada. Akun-akun yang dirasa kurang maksimal dan sulit terealisasi akan dipindahkan dengan tujuan pemenuhan target perjanjian kinerja. Dari strategi ini beberapa perjanjian kinerja lain dapat melebihi target dari setiap indikator dan capaian dari realisasi anggaran yang didapat adalah 106,94%.



Gambar 24. . Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan antar Tahun

Target Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Biro Keuangan menargetkan persentase realisasi anggaran sebesar 91%. Tahun 2021, persentase realisasi anggaran ditingkatkan menjadi 97% dan pada tahun 2022 target anggaran diturunkan menjadi 93%. Meski terdapat perubahan dalam penetapan target realisasi anggaran Biro Keuangan,

realisasi anggaran Biro Keuangan setiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 persentase realisasi anggaran Biro Keuangan mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0.5% dalam realisasinya. Hal ini disebabkan antara lain tidak terserapnya alokasi anggaran lembur dan uang makan lembur baik bagi PNS maupun PPNASN meskipun sudah dilakukan optimalisasi atas anggaran lembur tersebut.

Berdasarkan target dan capaian realisasi anggaran Biro Keuangan di tahun 2022 yang sudah melebihi 100%. Biro Keuangan berusaha untuk tetap melakukan realisasi anggaran melebihi target yang ditetapkan atau lebih dari 99% untuk setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024.



Untuk mencapai realisasi ini Biro Keuangan tetap akan melanjutkan strategi revisi dan realokasi terhadap anggaran yang menjadi prioritas dan merevisi anggaran yang tidak maksimal untuk digunakan dalam kegiatan lain yang bisa menunjang keberhasilan mencapai target dalam perjanjian kinerja.

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 16. Realisasi Anggaran Biro Keuangan

| Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|---|--------------------|-------------------|-----------|
| Program Dukungan Manajemen | Rp 243.997.383.000 | Rp242.663.581.423 | 99,45% |
| Biro Keuangan | Rp 5.334.256.000 | Rp 5.260.809.057 | 98,62% |
| Bagian Administrasi Keuangan | Rp231.543.073.000 | Rp230.286.207.140 | 99,46% |
| Bagian Administrasi Barang Milik Negara | Rp 4.997.351.000 | Rp 4.995.414.587 | 99,96% |
| Bagian Perjalanan | Rp 2.122.703.000 | Rp 2.121.150.639 | 99,93% |

Komponen terbesar anggaran Biro Keuangan adalah belanja 51 atau belanja pegawai yang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp225.304.651.000,- atau 92,3% dari keseluruhan anggaran Biro Keuangan. Tentunya *nature* dari belanja pegawai tersebut dapat diperkirakan realisasinya setiap bulan. Biro Keuangan dituntut untuk dapat melakukan perhitungan yang maksimal setiap bulannya atas kebutuhan belanja pegawai tersebut. Pada tahun anggaran 2022, realisasi belanja pegawai adalah sebesar 99,44%. atau Rp224.051585.646,. Tercapainya target realisasi anggaran Biro keuangan juga didukung oleh peran penyerapan anggaran pada masing-masing unit eselon III di bawah Biro Keuangan yang seluruhnya mencapai angka 99%.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Pada Tahun Anggaran 2022, Biro Keuangan telah mewujudkan kinerjanya melalui pelaksanaan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022

| Tujuan/ Sasaran | Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan | | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori |
| 1 | Indeks Pengelolaan Keuangan | 91 | 93,96 *) | 103,3% | Tercapai |
| 2 | Indeks Pengelolaan Aset | 3,20 | 3,59 | 112,9% | Tercapai |
| 3 | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3,40 | 3,35 | 98,53% | Tidak Tercapai **) |
| 4 | Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 97% | 99,90% | 102,27% | Tercapai |
| 5 | Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara | 80% | 85% | 106.30% | Tercapai |
| 6 | Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan | 93% | 99,45% | 106,94% | Tercapai |

Tidak tercapainya target indeks kepuasan atas layanan Biro Keuangan antara lain disebabkan perubahan mekanisme pembayaran dari tunai menjadi transfer. Namun demikian bukan berarti Biro Keuangan akan kembali melaksanakan mekanisme pembayaran tunai kembali. Walaupun indeks kepuasan layanan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Keuangan Tahun 2022, namun capaian indeks sebesar 3,35% sebenarnya telah melampaui target indeks kepuasan layanan

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Dalam target jangka menengah tahun 2024, capaian indikator indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan diharapkan mampu mencapai angka 3,24.

Tercapainya 5 (lima) target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja di atas, bukan berarti Biro Keuangan akan berpuas diri, tentunya ini menjadi pemicu bagi Biro Keuangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian relaisasi.

Selain itu, keberhasilan Biro Keuangan dalam mengelola anggaran tahun 2022 ditandai dengan adanya penghargaan yang diterima Biro Keuangan, diantaranya:

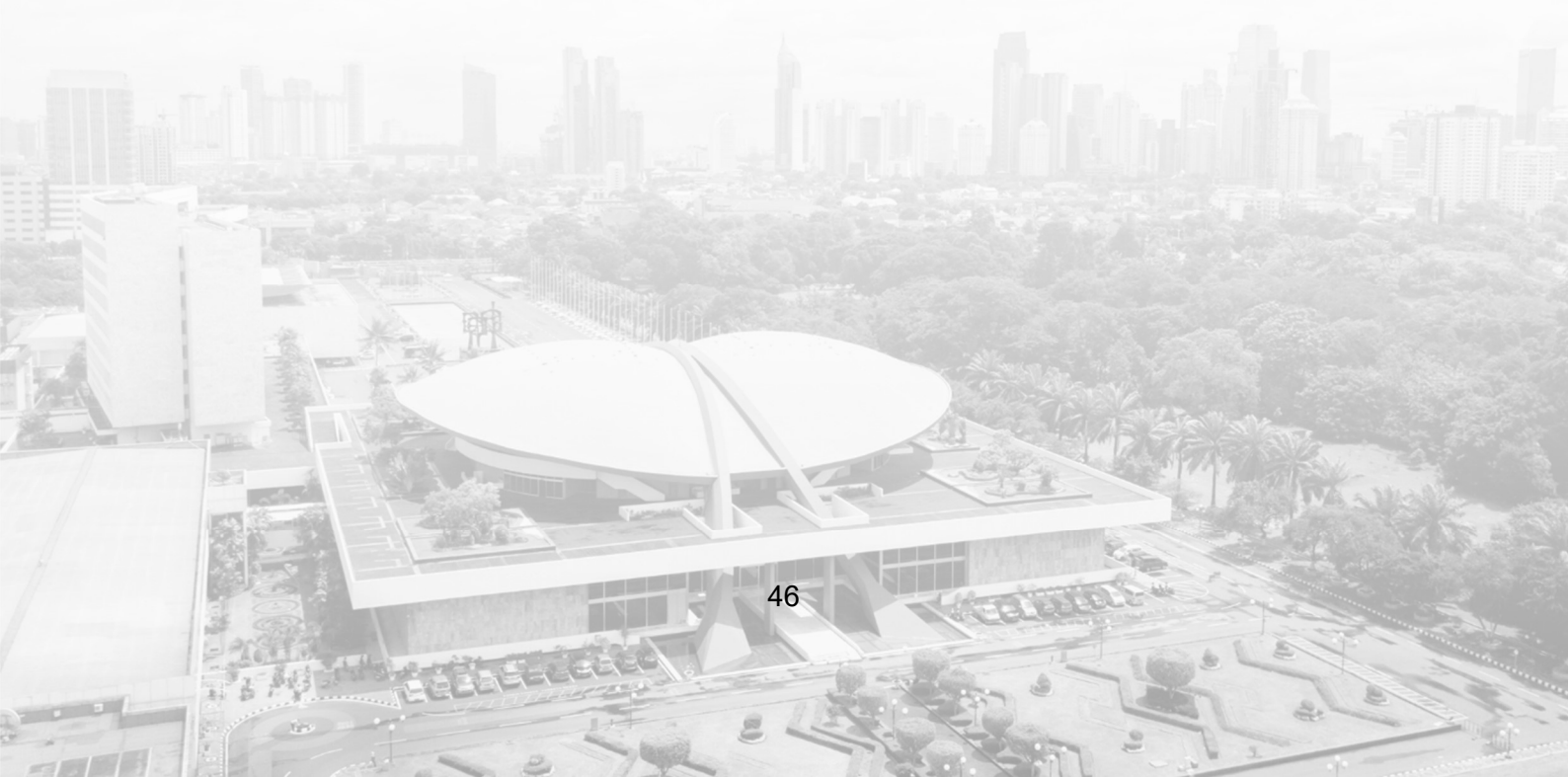
1. Menerima penghargaan dari Bank Mandiri atas realisasi SV terbesar periode Januari - September 2022 Satker kelolaan KPPN Jakarta VII
2. Menerima penghargaan kontribusi pemenuhan kewajiban pajak tahun 2021 Di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
3. Juara ketiga Anugerah Reksa Bandha, Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Terbaik

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi strategi Biro Keuangan dalam rangka peningkatan capaian target kinerja tahun yang akan datang adalah:

1. Peningkatan komitmen dan kesediaan *stakeholders* dalam menindaklanjuti instrumen yang diterbitkan oleh Biro Keuangan untuk mendukung pencapaian nilai IKPA;
2. Perlu lebih memperhatikan kebutuhan *stakeholders* dan indikator yang menjadi penilaian dalam survey kepuasan layanan Biro Keuangan dalam rangka peningkatan indeks layanan Biro Keuangan.
3. Penguatan regulasi dan tata kelola di lingkungan Biro Keuangan harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan mengikuti perubahan ketentuan aturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Perencanaan anggaran dan kegiatan Biro Keuangan harus lebih memperhatikan skala prioritas dan perhitungan optimalisasi anggaran harus lebih maksimal.
5. Melanjutkan dan mengembangkan Zona Integritas (ZI) Biro Keuangan dengan melakukan perbaikan serta inovasi di seluruh area ZI antara lain tagline *tagline* Biro Keuangan “Digit-*all* Keuangan” dan Biro Keuangan #Berakhlak #Bersih
6. Meningkatkan faktor-faktor yang mendorong pencapaian nilai IPA dan perbaikan tata kelola BMN, antara lain pelaksanaan rekonsiliasi secara rutin,

koordinasi dan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam membantu penyelesaian TLHP, serta rewiu terhadap RKBMN, MOU dari pemanfaatan maupun Laporan BMN, dan asuransi BMN,



PENGHARGAAN BIRO KEUANGAN TAHUN 2022



Gambar 25. Penghargaan Atas Realisasi SV Terbesar Satker Kelolaan KPPN Jakarta VII



Gambar 26. Juara Ketiga Anugerah Reksa Banda

FOTO KEGIATAN BIRO KEUANGAN TAHUN 2022



Gambar 27. Bimbingan Teknis Pengisian E Kinerja dan Evaluasi Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022



Gambar 28. Workshop dan Penandatanganan Pakta Integritas Optimalisasi IKPA DPR RI



Gambar 29. Proses pengukuran tanah kompleks perumahan DPR RI di Meruya, Kelapa Dua, Kemanggis, dan Kebon Jeruk atas Fasum/fasos yang dimanfaatkan oleh Pegawai Setjen DPR RI



Gambar 30. Workshop Penguatan Verifikasi Tagihan Perjalanan Dinas





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir. Sumariyandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.
NIP. 19700801 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas dukungan Biro keuangan | 1. Indeks Pengelolaan Keuangan | 91% |
| | | 2. Indeks Pengelolaan Aset | 3,20 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3,40 |
| | | 4. Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 97% |
| | | 5. Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara | 80% |
| | | 6. Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan | 93% |

| Program | Anggaran |
|----------------------------|-----------------------|
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 276.019.890.000,- |

Deputi Bidang Administrasi,

Jakarta, 18 Maret 2022
Kepala Biro Keuangan,


Ir. Sumaryandono, MPM.
NIP. 19650618 198311 1 001


Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.
NIP. 19700801 199603 1 001

